BAB II
KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat dinilai dari besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Soebagiyo, 2007:179). PDRB merupakan sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah atau regional tanpa memilih atas faktor produksi (Arsyad, 1992).

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2004) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).

Perhitungan metode langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil perhitungan yang sama (BPS, 2008).

Pendekatan produksi (*Production Approach*) dilakukan dengan menghitung nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun).

Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui nilai tambah (*value added*). Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sektor atau sub

sektor tersebut. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara. Biaya antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai *input* antara dalam proses produksi. Barang dan jasa yang yang termasuk *input* antara adalah bahan baku atau bahan penolong yang biasanya habis dalam sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan kurang dari satu tahun, sementara itu pengeluaran atas balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan yang diterima perusahaan bukan termasuk biaya antara. Begitu juga dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto bukan merupakan biaya antara (Tarigan, 2007).

Pendekatan produksi banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor yang produksinya berbentuk fisik/barang. PDRB menurut pendekatan produksi terbagi atas 17 lapangan usaha (kategori)[1] yaitu : Pertanian, Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan listrik dan gas, Pengadaan air, Konstruksi, Perdagangan, Transportasi, Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Sosial dan Jasa Lainnya.

Pendekatan pendapatan (*Income Approach*) dilakukan dengan menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun).

Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto (BPS, 2008)

Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*) dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto di suatu wilayah.

1 berdasarkan *Internasional Standard Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2)*

Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS,2008)

Kemudian penghitungan PDRB dengan metode tidak langsung atau metode alokasi diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini, digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto dan netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan ; jumlah produksi fisik ; tenaga kerja; penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

Cara penyajian PDRB terdapat PDRB Atas Dasar Harga Konstan,di mana semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Dan penyajian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian PDRB.

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya..

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasionalnya. Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah

kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Ma'ruf dan Wihastuti, 2008:46).

2.3 Pendapatan Perkapita

Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan pendapatan perkapita penduduk daerah tersebut yang diwakili oleh produk domestik regional bruto (PDRB). Peningkatan PDRB berarti kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ini ditandai dengan naiknya tingkat pendapatan perkapita penduduk setiap tahunnya sehingga semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah. Maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah. Semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan yang bisa digali dari daerah tersebut.

Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu Negara pada tahun tersebut. Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan perkapita oleh pemerintah suatu Negara pada umumnya adalah produk domestik bruto (Ritonga,2007)

Pendapatan perkapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu Negara dari tahun ke tahun .dengan melakukan perbandingan seperti itu. Kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat suatu Negara secara rata-rata telah meningkat. Pendapatan perkapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat. Pendapatan perkapita menunjukkan pula apakah pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, seberapa

besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang ditimbulkan oleh peningkatan tersebut (Ritonga,2007)

Secara ringkas (Ritonga,2007) beberapa manfaat penghitungan pendapatan perkapita adalah sebagai berikut *(i)* Mengetahui perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu Negara dari tahun ketahun, *(ii)* Mengetahui data data perbandingan tingkat kesejahteraan penduduk suatu Negara dengan Negara yang lain, *(iii)* Pedoman evaluasi kebijakan dalam bidang ekonomi, *(iv)* bahan perencanaan pembangunan dimasa yang datang, *(v)* Membandingkan standar hidup beberapa Negara dalam kelompok rendah, menengah dan tinggi.

2.4 Struktur Ekonomi dan Pergeseran Ekonomi

Secara teoritis, struktur ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai sisi. Kontribusi atau peranan sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonomi. Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu, maka dapat dilihat perubahan dan pergeseran struktur sebagai indikator adanya proses pembangunan. Misalnya, adanya penurunan peran sektor pertanian yang diikuti dengan kenaikan peran sektor Industri.

Dalam kaitannya dengan struktur ekonomi suatu wilayah, Todaro (2000) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral. Beberapa perubahan komponen utama struktural ini mencakup pergeseran secara perlahan-lahan aktifitas pertanian ke sektor nonpertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa. Suatu wilayah yang sedang berkembang proses pertumbuhan ekonominya akan tercermin dari penggeseran sektor ekonominya. Yaitu tercermin dari pergeseran sektor ekonomi tradisional dimana sektor pertanian akan mengalami penurunan di satu sisi dan

peningkatan peran sektor nonpertanian di sisi lainnya. Terkait dengan proses pembangunan daerah, maka struktur ekonomi memiliki peran penting dalam konsep pendekatan model pembangunan daerah.

Perubahan struktur ekonomi atau disebut juga transformasi struktural, didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam komposisi dari permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti penggunaan tenaga kerja dan modal) yang disebabkan adanya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Perekonomian suatu daerah dalam jangka panjang akan terjadi perubahan struktur perekonomian dimana semula mengandalkan sektor pertanian menuju sektor industri. Dari sisi tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian desa ke sektor industri kota, sehingga menyebabkan kontribusi pertanian meningkat. Faktor penyebab terjadinya perubahan struktur perekonomian antara lain ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta modal dan investasi yang masuk ke suatu daerah.

2.5 Sektor Basis dan Non Basis

Kegiatan perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor kegiatan, yaitu aktivitas basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan, sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan berorientasi lokal yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan.

Arsyad (1999), menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap

perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional (Adi Sasmita, 2005).

Mengacu pada teori ekonomi basis tersebut maka Arsyad (2008) menjelaskan bahwa teknik *location Quotient* dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan yaitu:

1. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan sektor ekonomi potensial (basis);
2. Kegiatan sektor ekonomi yang hanya dapat melayani pasar di daerah itu sendiri dinamakan sektor ekonomi tidak potensial (non basis) atau *local industry*.

2.6 Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu wilayah atau negara dalam memproduksi satu unit dari beberapa komoditi dengan biaya yang relatif rendah dari biaya imbangan sosialnya dari alternatif lainnya. Keunggulan komparatif merupakan suatu konsep yang diterapkan suatu negara untuk membandingkan beragam aktivitas produksi dan perdagangan di dalam negeri terhadap perdagangan dunia (*Asian Development Bank*, 1992 dalam Suciany 2007).

Dinamisnya keunggulan komparatif yang berarti suatu negara yang memiliki keunggulan komparatif di sektor tertentu secara potensial harus mampu mempertahankan dan bersaing dengan negara lain. Keunggulan komparatif berubah karena faktor yang mempengaruhinya antara lain ekonomi dunia, lingkungan domestik dan teknologi (Zulkarnaini, 2007). Konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali, karena itu konsep keunggulan komparatif tidak dapat dipakai untuk mengukur daya saing suatu kegiatan produksi pada kondisi perekonomian aktual.

2.7 Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif digunakan untuk mengukur daya saing suatu aktivitas dan keuntungan privat berdasarkan harga pasar dan nilai tukar uang resmi yang berlaku atau dengan kata lain melakukan analisa finansial terhadap aktivitas tersebut. Konsep keunggulan kompetitif didasarkan pada asumsi bahwa perekonomian yang tidak mengalami distorsi sama sekali yang sulit ditemukan dalam dunia nyata.

Konsep keunggulan kompetitif pertama kali dikembangkan oleh Porter pada tahun 1980 yang bertolak dari kenyataan-kenyataan perdagangan internasional yang ada. Porter menyatakan bahwa keunggulan perdagangan antara negara dengan negara di dalam perdagangan internasional secara spesifik untuk produk-produk tertentu sebenarnya tidak ada. Fakta yang ada adalah persaingan antara kelompok-kelompok kecil industri di satu negara dengan negara lainnya, bahkan antara kelompok industri yang ada di dalam suatu negara. Oleh karena itu, keunggulan kompetitif dapat dicapai dan dipertahankan dalam suatu subsektor perekonomian tertentu di suatu negara, dengan meningkatkan produktivitas penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang ada (Novianti,1995). Suatu komoditi mungkin saja mempunyai keunggulan komparatif sekaligus keunggulan kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi tersebut sangat menguntungkan untuk diproduksi. Di samping itu, ada juga komoditi yang mempunyai keunggulan komparatif tetapi tidak memiliki keunggulan kompetitif, sehingga dapat diperkirakan ada distorsi pasar yang tidak menguntungkan produksi komoditi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu sekiranya untuk melakukan deregulasi terhadap faktor-faktor yang dapat menghambat produksi komoditi tersebut.